

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek *rent seeking* (mencari rente) merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktek *rent seeking* memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki (Olson, 1982).

Selanjutnya, *rent seeking* ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal domestik maupun asing dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi (Thamren Ananda, 2010).

Negara berkembang merupakan ladang yang sangat besar bagi pelaku *rent seeking* terutama di negara kawasan Asia. Mushtaq Khan dan Jomo (2000), menjelaskan bagaimana praktek *rent seeking* terjadi di Asia yang memberikan pengaruh yang sangat besar dan merusak pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa praktek *rent seeking* terjadi pada negara-negara yang sedang membangun di Asia.

Rent seeking di Asia banyak dilakukan oleh para politisi, pemerintah, kapitalis (pemilik modal), para mafia, dan juga oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan yang kuat. Kesenjangan ekonomi yang sangat besar terjadi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah dan korupsi yang terus mengakar pada perekonomian negara kawasan Asia.

Kunio dalam Mushtaq Khan dan Jomo(2000), menjelaskan bahwa kapitalisme yang berkembang di Asia tenggara bersifat semu atau tidak sebenarnya, tidak bersifat dinamis seperti yang terjadi di Inggris, Eropa, Amerika Serikat maupun Jepang dan kapitalisme yang terjadi didominasi oleh para pemburu rente. Disamping itu ada pemimpin-pemimpin politik, penerus keluarga dan keluarga keraton yang terlibat dalam bisnis *rent seeking*. Pemimpin-pemimpin tersebut memburu proteksi kompetisi asing, konsesi, lisensi, hak monopoli dan subsidi pemerintah sehingga menumbuhkan dengan subur penyelewengan yang telah mengakar pada perekonomian.

Praktek *rent seeking* dan korupsi yang tinggi menyebabkan pembangunan ekonomi di negara Asia menjadi berbiaya tinggi (*high cost economy*) sehingga terjadi *inefisiensi* (Mushtaq Khan dan Jomo, 2000). Tingginya biaya tersebut akibat disalokasi sumberdaya oleh para pejabat publik. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan tingginya biaya transaksi (*transaction cost*) dengan sistem birokrasi berbelit-belit yang ditetapkan oleh pejabat publik dalam pembangunan ekonomi. Biaya transaksi ini dapat berupa ongkos untuk melakukan negoisasi, mengukur dan memaksakan pertukaran atau dapat juga berupa biaya pencarian dan informasi, biaya negoisasi (*bargaining*) dan keputusan atau mengeksekusi

kontrak dan biaya pengawasan (*monitoring*), pemaksaan dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*) (Mburu, 2002:42).

Berdasarkan laporan lembaga *Transparency International* pada *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2015, skor Indonesia naik 2 poin dari tahun lalu dan peringkat naik 19 posisi negara-negara di dunia. Yang mana pada tahun 2015 ini skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur oleh *Transparency International*. Kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki Malaysia (50) dan Singapura (85) dan sedikit dibawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31) dan jauh diatas Myanmar (22). Laporan tersebut menerangkan bagaimana gambaran tingkat korupsi yang terjadi di negara ASEAN sangat mempengaruhi besarnya pengaruh fenomena tersebut terhadap aktivitas *rent seeking* di negara ASEAN+6 seperti yang terdapat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peringkat dan Skor CPI (*Corruption Perception Index*) Tahun 2015

Negara	Peringkat global	Skor
Singapura	8	85
Malaysia	54	50
Thailand	76	38
Indonesia	88	36
Filipina	95	35
Vietnam	112	31
Myanmar	147	22
Australia	13	79
New Zealand	4	88
Jepang	18	75
India	76	38
Korea Selatan	37	56
Cina	83	37

Sumber : *Transparency International*, 2015

Sedangkan pada negara integrasi ekonomi ASEAN+6 yang menjadi anggota kerja sama ekonomi memperlihatkan skor yang diatas 50 point, seperti negara Australia (79), New Zealand (88), Jepang (75) dan Korea Selatan (56). Negara-negara tersebut menunjukkan tingginya angka persepsi korupsi negara yang menandakan semakin tinggi indeks persepsi korupsi semakin bersih negara dari tindakan korupsi. Namun masih ada dua negara yang memiliki indeks di bawah 50 point yaitu negara India (38) dan Cina (37). Artinya, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak menjamin indeks persepsi suatu negara dan praktek *rent seeking* belum tentu tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

Dengan berbagai macam bentuk dan jenis praktek *rent seeking* terhadap perekonomian dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Praktek *Rent Seeking* (Mencari Rente) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN+6 Tahun 2000-2014 “**.

1.2 Rumusan Masalah

Praktek *rent seeking* diyakini telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan buruknya perekonomian di Asia karena praktek *rent seeking* telah menjamur dan tidak bisa dielakkan dalam praktek ekonomi antar negara yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dengan hak kekuasaan yang dimiliki berusaha mengeluarkan modal yang minim dengan menyalahgunakan kekuatan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu praktek *rent seeking* telah memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia termasuk pada pertumbuhan ekonomi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6.

Praktek *rent seeking* yang bervariasi di Asia, bahkan sampai saat ini belum diketahui bagaimana variasi pengaruh *rent seeking* terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6. Berdasarkan masalah yang dikemukakan ini, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh praktek *rent seeking* (mencari rente) terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6?
- b. Apa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisirkan praktek *rent seeking* (mencari rente) di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang pengaruh praktek *rent seeking* (mencari rente) terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6.
- b. Mengemukakan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir praktek *rent seeking* di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh praktek *rent seeking* (mencari rente) terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6.

b. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan perekonomian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada pengaruh praktek *rent seeking* terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6 karena berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Transparency Internasional, secara keseluruhan negara kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6 dari tahun 2000-2014 memiliki rata-rata nilai indeks persepsi korupsi di bawah nilai lima.
- b. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *World Development Indicator*, *World Bank*, *Transparency International*, *Education All Indicator Statistik* dan *Internasional Monetary Fund*.
- c. Data indeks persepsi korupsi, GDP perkapita dengan harga konstan tahun 2010, investasi asing langsung (*foreign direct investment*), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pertumbuhan populasi yang merupakan data tahunan dari Tahun 2000-2014.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Literatur

Bab ini membahas konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan, serta penelitian terdahulu yang menjadi literatur penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis data, sumber data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Analisis Perkembangan Variabel-variabel Penelitian

Bab ini menguraikan tentang perkembangan indeks persepsi korupsi, produk domestik bruto perkapita, *foreign direct investmen* (FDI), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pertumbuhan populasi di kawasan integrasi ekonomi ASEAN+6.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menggunakan analisis hasil regresi dan pembahasan serta implikasi kebijakan dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diperlukan.

